

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"

TEMA : Mendorong Kampanye yang Inklusif Tanpa Ujaran Kebencian dan Hoaks

Pemateri :

1. **Aqidatul Izza Zain- Peneliti Sindikasi Pemilu dan Demokrasi**
2. **Yolanda Panjaitan- Manajer Pengetahuan Cakra Wikara Indonesia (CWI)**
3. **Yossa Nainggolan- Direktur Ragan Institute**

Moderator : Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

1. Yolanda Panjaitan

- a. Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah mudahnya hoaks, misinformasi dan ujaran kebencian bisa menyebar luas saat kampanye.
- b. Ungkapan kebencian terbukti semakin menguat menjelang pemilu 2024.
- c. Teman-teman kelompok syiah di Sampang yang mengalami pengusiran. Saat Pilkada juga ada salah satu calon kepala daerah yang secara terang-terangan mengungkapkan ujaran kebencian kepada mereka.
- d. Ujaran kebencian dapat memarginalisasi kelompok minoritas dengan lebih parah.
- e. Tantangan penegakan hukum Ketika kampanye ada beberapa poin. Pertama adalah sejauh mana kapasitas penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu dalam menerjemahkan aturan teknis terkait dengan ujaran kebencian, hoaks, adu domba dan lain-lain. Kedua, kritik terhadap pemerintah/Lembaga pemerintah/partai tertentu dikriminalisasi yang kemudian seringkali dituntut menjadi hal-hal yang berkaitan dengan ujaran kebencian atau pencemaran nama baik. Ketiga adalah minimnya kesadaran akan transaksi programatik antara calon atau partai dengan konstituen membuat maraknya penggunaan identitas minoritas.
- f. Perlu penguatan aspek Pendidikan dan kesadaran bagi para pelaksana kampanye tentang kampanye yang inklusif,
- g. Pendidikan bagi pelaksana kampanye caleg dan atau partai tentang kampanye inklusif

- h. Pendidikan bagi pengawas Pemilu dan instansi terkait dalam memilah hoaks dan ujaran kebencian.
- i. Pendidikan pemilih untuk kritis mengidentifikasi dan menganalisis hoaks dan ujaran kebencian.

2. Aqidatul Izza

- a. Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 35).
- b. Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (Pasal 267 ayat 1).
- c. Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum dan lain-lain.
- d. Dampak kampanye hitam diantaranya ada beberapa seperti misalnya mengedepankan strategi-strategi non programatik, ujaran kebencian dan hoaks dapat merusak kemampuan public dalam menentukan pilihannya secara jernih, Pemilih bisa mengabaikan pendirian dan penilaiannya yang rasional, Mencederai kualitas partisipasi masyarakat dan Memecah belah bangsa.

3. Yossa Nainggolan

- a. Ujaran kebencian secara umum dapat didefinisikan sebagai pernyataan lisan yang menyatakan kebencian atau mendorong kekerasan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan pada latar belakang tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin atau orientasi seksual.
- b. Menurut Yossa, stigmatisasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas psikososial masih seringkali ditemukan. Hal ini tentu sangat merugikan mereka mengingat tidak semua penyandang disabilitas psikososial tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ini berkaitan dengan kondisi penyandang psikososial yang ternyata memiliki fase. Jadi Ketika mereka sedang berada di fase “normal”

FORUM DISKUSI

1. Erika

Bagaimana mengatasi ujaran kebencian bagi perempuan?

Jawaban:

Partai Politik harus memiliki kesadaran untuk memberdayakan dan melakukan penguatan internal bagi kader-kader perempuannya. Selain itu, Pendidikan politik bagi perempuan

seharusnya tidak ditujukan untuk perempuan menjadi pemimpin politik saja tetapi juga untuk memberi ruang bagi perempuan untuk tumbuh dan berkembang dalam wadah tersebut.

2. Ewin

Apa cara yang konkrit untuk mencegah ujaran kebencian dalam hal penegakan hukum?

Jawaban:

Mengajak teman-teman media untuk gencar menyuarakan isu-isu tersebut dalam rangka menciptakan tekanan publik. Selain itu, perlu adanya kesepakatan bersama dengan *multi-stakeholder*.

3. Ninda

Bagaimana kita menyikapi Pemerintah yang sikapnya cenderung seperti menghindari?

Jawaban:

Sebagai masyarakat sipil mau tidak mau tetap harus berjuang dan memonitor.

4. Adinda T

Bagaimana tanggapan terkait Calon Presiden boleh kampanye di Kampus?

Jawaban:

Kampus sebetulnya adalah organisasi dengan posisi yang netral sehingga independensi akademisi harus dipertahankan. Alternatif yang bisa dilakukan adalah diskusi mahasiswa yang untuk mendiskusikan dan membedah program-program calon presiden tanpa harus mengundang yang bersangkutan datang.

CLOSING STATEMENT

1. Izza:

Kita perlu mulai aware dengan ujaran kebencian dan hoaks sehingga dampak negatifnya bisa diminimalisir.

2. Yossa Nianggolan:

Berharap kita semua dapat memperkaya pengetahuan terkait dengan cara mendapatkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentunya dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Catatan :

- 1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>**
- 2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".**

~ TERIMA KASIH ~